



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 818/VI/2014

1/JUNI 2014

DPR Lindungi Kepentingan Industri Musik



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MEI 2014

Minggu keempat bulan Mei 2014 Masa Sidang IV 2013-2014, DPR mengagendakan Rapat Paripurna membahas Pandangan Fraksi Atas Materi yang Disampaikan Pemerintah Tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. Selain itu, dilaporkan pula hasil RDP Komisi II DPR dengan KPU. Berikut ringkasannya:

Rapat Paripurna 26 Mei 2014

Sebelum agenda rapat dimulai, Ketua Rapat memberitahukan bahwa telah terjadi Penggantian Antar-Waktu dan Pengambilan Sumpah Anggota DPR-RI pada tanggal 25 Maret dan 1 April 2014 berdasar Keputusan Presiden No. 17/P dan 18/P tahun 2014 tertanggal 19 Maret, serta Keputusan Presiden No. 20/P tertanggal 28 Maret. Ketiga nama anggota yang telah diambil sumpahnya diperkenalkan kepada Rapat Paripurna, yaitu: [1] Drg. Hj. Rini Rahmadhani dari Partai Golkar, menggantikan Ir. Arsyad Juliandi Rahman MBA, [2] Rr. Ida resmi Nurani dari PDI-Perjuangan menggantikan Ganjar Pranowo, [3] H. Zainuddin dari Partai Demokrat, menggantikan Hj. Iti Octavia Jayabaya SE. MM.

Sesuai agenda yang ditetapkan Rapat Bamus, agenda paripurna adalah membahas Pandangan Fraksi Atas Materi yang Disampaikan Pemerintah Tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. Pandangan fraksi-fraksi disampaikan oleh 9 fraksi melalui juru bicara masing-masing untuk menanggapi Keterangan Pemerintah yang disampaikan Rapat Paripurna minggu sebelumnya. Pada saat Memberikan Keterangan Pemerintah, minggu sebelumnya, Pemerintah mengatakan bahwa peluang pengembangan ekonomi nasional 2015 makin luas namun disertai tantangan dan resiko yang makin kompleks.

Berkaitan dengan itu Pemerintah berkomitmen untuk berupaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Perumusan kebijakan fiskal senantiasa memper-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



timbang harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, antisipasi terhadap dinamika ekonomi dan akselerasi pencapaian target pembangunan dan meningkatkan perlindungan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal akan lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kebijakan Fiskal 2015 diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk memperkuat stimulus fiskal, ditempuh melalui sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan. Di tahun 2015, Pemerintah akan berusaha mendorong optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja negara untuk menjaga

kesinambungan fiskal. Untuk mengamankan target penerimaan perpajakan, Pemerintah antara lain akan melakukan penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi dan penegakan hukum. Penggalan potensi perpajakan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi.

Di bidang penerimaan bukan pajak, Pemerintah akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan melalui pencapaian target produksi dan efisiensi kegiatan usaha sumberdaya alam, perbaikan tarif iuran produksi/royalti dan revisi peraturan perundangan. Disamping itu, Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan penerimaan PNPB lainnya



melalui ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan pemungutan, dan monitoring serta pengawasan pengelolaannya.

Adapun pendapat fraksi-fraksi akan saya sampaikan pada *buletin Parleментарia* edisi berikutnya.

RDP Komisi II

RDP Komisi II dengan KPU pada 20 Mei mengacarakan dua agenda yaitu: [1] Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 [2] membahas persiapan dan kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Namun, karena padatnnya agenda ini, maka yang baru dibahas secara tuntas adalah agenda pertama, sedangkan agenda kedua akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei.

Pada agenda *pertama*, Ketua KPU menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan pemilu 2014, diantaranya ialah pada tanggal 9 Mei 2014 telah dilaksanakan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum secara nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan sesuai ketentuan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dari 12 Partai Politik peserta Pemilu, yang memenuhi ambang batas 3,5% ada 10 Partai Politik yang memenuhi ambang batas, yaitu Partai NasDem 6,72%; PKB 9,04%; PKS 6,79%; PDI-Perjuangan 18,95%; Partai Golkar 14,75%; Partai Gerindra 11,81%; Partai Demokrat 10,19%; PAN 7,59%; PPP 6,53%; dan Hanura 5,26%.

Partai Politik	Jumlah Kursi
Partai NasDem	35 kursi
Partai Kebangkitan Bangsa	47 kursi
Partai Keadilan Sejahtera	40 kursi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109 kursi
Partai Golkar	91 kursi
Partai Gerindra	73 kursi
Partai Demokrat	61 kursi
Partai Amanat Nasional	49 kursi
Partai Persatuan Pembangunan	39 kursi
Partai Hanura	16 kursi
Jumlah	560 kursi

Dengan demikian hanya 10 Partai Politik tersebut yang berhak disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR. Sedangkan 2 partai yang tidak mencapai ambang batas 3,5% yaitu: Partai Bulan Bintang 1,46%; dan PKPI 0,91%. Sehingga, kedua partai tersebut tidak disertakan dalam penghitungan kursi Anggota DPR. Jumlah suara sah Pemilu

Legislatif 2014 adalah sebesar 124.972.491. Sedangkan jumlah suara tidak sah sejumlah 15.076.606.

Pada tanggal 14 Mei 2014, KPU telah menetapkan 560 calon terpilih untuk 560 kursi DPR-RI dan 132 calon terpilih DPD untuk 132 kursi DPD-RI melalui Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU No. 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Ketua KPU melaporkan bahwa, terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses rekapitulasi tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat nasional, tidak mengganggu proses keseluruhan atau mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemungutan suara ulang yang dilakukan di beberapa TPS disebabkan atas beberapa alasan, yaitu tertukarnya surat suara, adanya pelanggaran administrasi dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara di TPS atas rekomendasi Bawaslu/ Panwaslu dan adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan hilang/ rusaknya dokumen pemungutan suara. KPU mengakui DPT Pemilu Legislatif masih memiliki beberapa kelemahan, misalnya masih terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT maupun DPK sehingga mereka harus menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya, dan laporan dari beberapa LSM yang menyatakan bahwa masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih ganda) yang terdaftar di DPT. Hal tersebut dapat terjadi karena kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam proses pemutakhiran dan penyusunan DPT, antara lain: [1] kondisi geografi bangsa Indonesia yang sangat beragam sifatnya, mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang sulit diatasi oleh petugas di lapangan; [2] mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam atau menit, [3] jaringan internet yang tidak merata tersedia di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Indonesia, [4] jaringan listrik yang tidak stabil di wilayah luar Pulau Jawa; dan [5] penyelenggaraan Pilukada yang berbarengan dengan proses pemutakhiran data pemilih.

Kesimpulan RDP tersebut antara lain yaitu: [1] Komisi II DPR RI memberikan catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang masih banyak dengan kecurangan serta politik uang yang masih sistematis di beberapa daerah, termasuk penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Apabila terdapat perangkat KPU yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk mengambil langkah tegas dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan [2] Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk memberikan laporan secara lisan dan tertulis yang menjelaskan keseluruhan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 secara rinci, komprehensif dan obyektif yang dapat meyakinkan Komisi II DPR RI bahwa KPU akan mampu melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lebih berkualitas, jujur dan adil. ***

DPR Lindungi Kepentingan Industri Musik



Foto bersama Anggota Pansus Hak Cipta dengan para pelaku industri musik.

Keluhan para pencipta lagu bahwa mereka tak pernah mendapat royalti yang memadai dari lagu-lagu karyanya sendiri, mendapat perhatian khusus dari Pansus RUU Hak Cipta DPR RI. Tak hanya pencipta, semua pelaku di industri musik akan mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Hak Cipta dengan para pelaku industri musik di ruang Banggar Nusantara I DPR, Rabu (28/5) lalu. Rapat dipimpin Ketua Pansus Didi Irawadi (FPD) didampingi 2 Wakil Ketuanya Ahmad Kurdi Moekri (FPPP) dan Deding Ishak (FPG).

Rapat menghadirkan perwakilan grup musik Panbers dan Koes Plus. Hadir pula musisi Anang Hermansyah, manajemen Inul Dartista, Kartika E-Musik, dan pencipta lagu Hendy Irvan. RUU ini akan menggantikan UU No.19/2002 yang dinilai sudah tidak bisa lagi menampung kebutuhan kekinian hak cipta dari para pemilik cipta. Tidak saja di industri musik, RUU ini juga menjangkau industri seni kreatif lainnya seperti para pemahat dan pematung.

Diakui Didi Irawadi, para pencipta lagu, memang belum mendapat perlindungan optimal. Royalti yang diterima pencipta lagu dari para produser musik masih terlalu kecil, sekitar 20% saja. Belum lagi aksi pembajakan atas karya mereka, kian membuat hidup para pencipta terpuruk.

Negara seperti tak berdaya melindungi para pencipta dari pembajakan karya cipta. Untuk itulah, RUU Hak Cipta juga ingin melindungi para pencipta dari aksi pembajakan yang sudah sangat kronis terjadi di Indonesia. Para pembajak menjadi musuh bersama para pelaku industri musik. Untuk melindungi industri musik, tak melulu pencipta yang mendapat perlindungan, tapi penyanyi, produser, hingga pengusaha karaoke.

Sementara itu, musisi Anang Hermansyah menilai rumusan RUU ini sangat baik. Bahkan, sudah jauh lebih baik daripada UU No.19/2002 tentang Hak Cipta yang masih berlaku sekarang. Anang sendiri mengaku, kapasitasnya tidak saja sebagai penyanyi, tapi juga pencipta lagu, produser, dan pengusaha karaoke sekaligus. Beberapa pasal memang masih mendapat catatan kritis calon anggota legislatif terpilih dari PAN tersebut.

“Perubahan UU ini sudah sangat signifikan dan banyak mengakomodir semua pihak di industri musik,” ungkapnya. Anang mengusulkan, untuk melindungi semua kepentingan, perlu dibentuk semacam badan sentra musik yang menghimpun para musisi, pencipta lagu, penyanyi, produser, pengusaha karaoke, penegak hukum, dan akademisi. Di sentra musik tersebut nantinya persoalan pembajakan, royalti, dan hak cipta diselesaikan bersama. Sehingga tidak ada lagi pencipta lagu yang mengeluh karena tidak dapat royalti atau karyanya dibajak secara masif. (mh)

PAUD Masih Dimarjinalkan

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djunjunan menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memarjinalkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal, di jenjang pendidikan inilah, anak berada pada usia emas, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius.

“PAUD itu satuan pendidikan paling penting, karena anak-anak PAUD sedang berada dalam usia emas. Di sanalah anak-anak apakah akan menjadi sarjana, atau menjadi durjana. Itulah letak pentingnya PAUD, sedang di kita PAUD masih dimarjinalkan, dan masih mengutamakan pendidikan tinggi,” ujar Popong, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh, di Gedung Nusantara, Senin (26/05) malam.

Politisi Golkar ini menilai, justru pendidikan tinggi itu tidak terlalu berat, karena yang ditekankan adalah ilmu

pengetahuan. Ditambah, jika anak sudah menjadi mahasiswa, sudah sulit diubah budi pekertinya.

“Tenaga pendidik di PAUD juga harus betul-betul profesional. PAUD saat ini, masih terkesan asal-asalan, jadi rusak anak-anak itu,” imbuh Popong.

Apalagi, kasus yang terjadi di Jakarta International School juga menimpa siswa PAUD, sehingga makin mengesankan PAUD masih dipandang sebelah mata.

“PAUD JIS syukur sudah ditutup. Dia sudah melanggar dua Undang-undang, yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak. Itu sudah berlangsung sejak 1998. Bayangkan, sudah berapa lama itu terjadi,” tegas Popong.

Politisi asal Dapil Jawa Barat ini terpaksa menggunakan kata konyol menanggapi kasus PAUD JIS ini. Ia berharap,



Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djunjunan. Pengalaman pahit ini tidak terjadi lagi.

“Ini sangat konyol, sudah melanggar dua UU, berlangsung belasan tahun, dan mungkin hanya bisa terjadi di negara kita. Oleh karena itu, ini pelajaran pahit untuk kita semua. Saya yakin, baik itu Kementerian, maupun seluruh lapisan masyarakat, dengan kejadian konyol ini, dapat terbuka mata dan hatinya,” harap Popong. (sf) foto: sofyaneffendi/parle/hr.

Komisi IV Khawatir Ketersediaan Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR mempertanyakan kelangkaan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani. Pasalnya, masih tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersial sehingga menyebabkan penyelewengan di lapangan.

Hal itu mengemuka saat Komisi IV DPR mengadakan RDP dengan jajaran Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Industri Pupuk Indonesia, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, baru-baru ini.

Herman mengatakan, kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) jangan sampai mengakibatkan semakin rendahnya daya saing para petani. Karena harga jual komoditas pertanian belum mencapai harga yang diinginkan.

“Kalau kenaikan pupuk tidak sejalan dengan Hasil Produksi Pertanian dikhawatirkan akan menurunkan kesejahteraan petani. Jadi kita akan mem-



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron.

pertimbangkan terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan selama pemerintah mampu membiayai untuk memberikan subsidi saya kira inilah yang terbaik untuk rakyat,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menekankan kepentingan rakyat harus kita perhatikan. Lebih utama, jika opsi-opsi ini bisa dilakukan tentunya tidak harus dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan pupuk. Opsi ini, dijelaskannya merupakan bagian Komisi IV dengan Pemerintah, dibahas supaya pupuk betul-betul mencukupi terhadap pupuk bersubsidi Tahun 2014.

“Banyak opsi yang kami bicarakan mudah-mudahan didalam pembahasan APBN Perubahan Tahun 2014 maupun APBN 2015 ini menjadi bahan dasar dan yang paling penting jangan sampai pupuk ini yang sesungguhnya harus jatuh kepada petani kecil dan petani yang berhak menerimanya, justru diselewangkan karena terjadinya disparitas harga dengan pupuk komersial yang begitu tinggi,” ungkap Herman Khaeron.

Yang kedua, lanjutnya, juga para Bupati dan Walikota di seluruh Indo-

nesia harus segera menandatangani Penetapan RDKK di Kabupaten/kota maupun di provinsi, karena juga keterlambatan Penetapan RDKK juga akan memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Sistem Pengawasan juga telah dialokasikan melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida (KP3) sebesar Rp.30 Milyar pada anggaran Tahun 2014. “Mohon juga ini diefektifkan menjadi instrumen yang mengawal pupuk subsidi sampai petani yang membudidayakan.” imbuhnya.

Dipenuhi 7,78 juta ton:

Seperti diketahui, dari 9,55 juta ton pupuk yang dianggarkan pada tahun

2014, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi peningkatan produksi petani melalui pupuk subsidi ternyata hanya terpenuhi 7,78 juta ton disebabkan biaya produksi tinggi.

“Ini yang menyebabkan secara merata pasti ada pengurangan kuantum pupuk di kabupaten dan kota pada seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi IV DPR dan Pemerintah akan menggodok opsi-opsi terkait Pupuk bersubsidi. Opsi pertama adalah kebutuhan pupuk rata-rata tetap diasumsikan 9,55 juta ton dengan merubah Permentan (Peraturan Menteri Pertanian).

“Hal ini sudah direkomendasikan

dalam RDP dengan Kementerian Pertanian, yang kemudian diharapkan pupuk dapat tersedia sampai Desember,” katanya.

Apabila dalam pembahasan APBN Perubahan tidak cukup anggaran, lanjutnya, untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut dapat dipenuhi melalui Pembahasan APBN 2015 melalui mekanisme kurang bayar yang nanti diaudit terdahulu oleh BPK.

“Banyak opsi selain mereview kembali HET, selain itu persoalan disparitas harga yang begitu tinggi antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersial menyebabkan penyelewengan,” ujarnya. (as/si) foto: andry/parle/hr.

Belanja Pemerintah Harus Mampu Stimulasi Perekonomian

Belanja Pemerintah pada tahun 2015 harus mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas yang aman serta menjaga kesinambungan fiskal. Demikian dikemukakan jubi Fraksi Partai Demokrat (FPD) Muslim, saat menyampaikan pandangannya atas Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015 di depan Sidang Paripurna DPR, Senin (26/5).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, FPD juga meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

Pandangan FPG yang dibacakan Anthon Sihombing mengharapkan peningkatan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi yang bersumber dari perluasan obyek pajak utamanya pajak orang pribadi sebab jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada. Perluasan sumber penerimaan pajak selain akan meningkatkan penerimaan negara juga akan menciptakan fondasi perekonomian nasional yang lebih kuat dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Mulai tahun 2015 pemerintah merencanakan mengalokasikan dana transfer bagi desa sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa. Fraksi PDI Perjuangan berharap melalui dana ini semakin terwujudnya desa mandiri melalui program-program yang berbasis desa secara merata dan berkelanjutan.

Yudi Widhiana Adia dari FPKS mengharapkan pemerintah



Jubi Fraksi Partai Demokrat, Muslim, saat menyerahkan pandangan atas Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015.

ke depan perlu mengubah paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara. Penerbitan surat utang ke depan perlu didesain lebih rendah dari tahun sebelumnya agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolut. Dengan demikian beban utang dapat dikurangi secara progresif dari waktu ke waktu.

Terkait asumsi harga minyak yang dipatok 95-110 dolar AS/barel, Fraksi PAN meminta Pemerintah untuk melakukan analisis dan kajian lebih lanjut. Pasaunya, hampir semua lembaga perminyakan internasional memprediksi bahwa

harga minyak masih akan tinggi untuk tahun 2015.

Tepat Target

Pandangan FPKB yang disampaikan Chusnunia Chalim menyoroti anggaran subsidi yaitu subsidi energi dan non energi. FKB berharap anggaran subsidi harus dikelola secara efisien dan diarahkan tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara. Fraksi ini minta pemerintah agar realisasi subsidi ini bisa tepat target sasaran dengan didukung basis data yang transparan dan menggunakan data sistem penyaluran yang lebih kredibel dan akuntabel.

Sementara Syaifullah Tamliha dari FPP meminta pemerintah memperbaiki pos-pos pengeluaran dalam fiskal 2015 agar lebih produktif dengan mendorong postur anggaran belanja pemerintah pusat tidak terbebani pengeluaran

belanja pegawai, bunga utang dan subsidi yang cenderung membuat pengelolaan fiskal tidak fleksibel.

Fary Djemi Francis dari Fraksi Gerindra meminta pemerintah memberantas mafia migas, yang konon mendapat keuntungan yang sangat besar dari impor BBM. Pertamina semestinya membeli langsung minyak mentah dari produsen, tidak lewat perantara atau *trader*, bila ini bisa dilakukan akan menghemat biaya pengeluaran.

Sedangkan Fraksi Hanura lewat jubirnya Nurdin Tambubolon mengharapkan pemerintah dalam jangka menengah dan panjang harus mengupayakan peniadaan defisit anggaran. Khusus untuk tahun 2015 dan jangka pendek ini diupayakan seminimal mungkin defisit agar tidak menambah hutang yang akan membebani perekonomian negara. (mp) *foto:odjie/parle/hr.*

Banggar Jangan Terjebak Mekanisme Proyek

Kewenangan Badan Anggaran (Banggar) membahas RAPBN sampai satuan tiga perlu ditinjau ulang. Pasalnya, kewenangan itulah sebenarnya yang membuat terjadinya negosiasi antara Pemerintah dan parlemen. Parlemen itu menyetujui secara keseluruhan terhadap *budget* pemerintah dan harus disadari bahwa APBN adalah kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. DPR menyetujui sedangkan detailnya dibahas di Komisi-komisi dan departemen terkait.

Hal itu ditegaskan anggota DPR Achsanul Qosasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5), menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan Banggar. MK menilai kewenangan Banggar harus dibatasi saat membahas anggaran teknis di kementerian. DPR seharusnya tidak membahas anggaran hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan 3.

Selain itu MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat. DPR hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju dengan tidak menunda pencairan.

Menurut Achsanul, apa yang dilakukan MK merupakan langkah bagus dan perlu didukung. Dengan demikian, Dewan tidak terjebak dalam mekanisme proyek atau seolah-olah ada negosiasi antara pemerintah dan DPR. Biarlah pemerintah menjalankan perannya sesuai dengan *budget-bugdet* dan sasaran kementerian yang sudah ada. "Jadi saya dukung MK, saya usulkan sudah dua tahun lalu agar Banggar tidak terjebak pada pembahasan satuan tiga," tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Terkait dengan menghilangkan "pembintangan", mata anggaran instansi pemerintah, politisi Partai Demokrat ini mengatakan yang membintangi anggaran bukan kewenangan Banggar DPR. DPR itu hanya menyetujui saja,



Anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi.

kalau ada sejumlah hal bukan terkait proyek misalnya adanya pemeriksaan BPK atau BPKP yang belum dijalankan, itu boleh disampaikan kepada pemerintah agar jangan terulang kembali.

"Tapi kalau membintangi ada hal-hal dan tujuan tertentu, saya tidak sepakat. Kalau pembintangan karena pemeriksaan BPK belum dilaksanakan saya setuju, DPR mempunyai hak melakukan itu," ia menjelaskan.

Ditambahkan, DPR dalam pembahasan RAPBN menyetujui program dan jumlah, sedangkan detailnya yang tahu pemerintah. Parlemen bukan eksekutor, tetapi pengawas sehingga apa yang sudah disetujui dalam nota keuangan yang diajukan, secara detail pemerintah yang tahu dan selanjutnya dibahas Komisi-komisi. "Kalau bicara proyek perproyek, saya rasa tidak pas, karena Komisi-komisi bisa melakukan evaluasi dan pengawasan setiap saat," tandas Qosasi. (mp) *foto:odjie/parle/hr.*

Perlu Langkah Cerdas Atasi Pembengkakan Subsidi BBM

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mendesak harus ada langkah yang lebih cerdas oleh Pemerintah untuk mengatasi beban subsidi yang kian membebani APBN. Usulan Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) supaya DKI menyetop penggunaan premium perlu menjadi pertimbangan. “Kalau kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya bisa dilakukan seperti itu, bisa membatasi subsidi secara signifikan. Ini bisa menyelamatkan ekonomi kita,” ujar Tamsil Linrung di Jakarta, Senin (26/5).

Menurut politisi PKS ini, kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun lalu tidak mampu menekan belanja subsidi BBM. Tahun ini pembengkakannya bahkan diperkirakan mencapai 35,26%. Dalam APBN 2014, pagu subsidi BBM, elpiji 3kg, dan BBN (bahan bakar nabati) ditetapkan sebesar Rp210,7 triliun. Namun, dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah mengajukan revisi pagu belanja subsidi menjadi Rp285 triliun. Angka tersebut membengkak Rp74,3 triliun dari pagu awal.

Sebagai salah satu solusi beban sub-



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung.

sidi, ia mendukung usulan Wagub DKI Ahok sebaiknya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di ibukota dicabut dan tidak diberlakukan kembali.

“Usul saya mengenai permasalahan BBM di Jakarta ini adalah sebaiknya subsidi untuk BBM itu dicabut dan dana subsidi itu bisa dialihkan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya,” kata Basuki.

Lebih lanjut Tamsil Linrung mengatakan, kalau semua lari ke subsidi, lari ke bansos ini berbahaya ke depan. Karena itu harus ada langkah-langkah

pembatasan konsumsi premium di kota-kota besar. Apalagi, berdasar pengamatannya, motor-motor di kota besar lebih senang memakai pertamax, mereka tidak mau antri panjang-panjang menunggu premium. Justru yang banyak menggunakan premium mobil-mobil yang mestinya menggunakan pertamax.

Ia menyebutkan, langkah yang radikal bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kata Tamsil dalam kondisi sekarang, kenaikan BBM tentu tidak diharapkan apalagi dalam masa pilpres sekarang ini. “Saya kira cukup beralasan untuk tidak melakukan ini,” tukasnya.

Anggota Dewan ini mengaku sudah mendengar hitungan-hitungannya kalau di kota-kota besar dilakukan pembatasan penjualan premium yang mencapai sekitar 2 juta kl. Ini merupakan penghematan yang cukup signifikan untuk menutupi angka subsidi yang sudah cukup tinggi. “Harus dilakukan sekarang jangan suka menunda-nunda. Mulai segera dan segera di realisasikan,” ucap Tamsil Linrung menambahkan. (mp) foto:odjie/parle/hr.

Tantowi Yahya Gantikan Agus Gumiwang

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita dari Fraksi Partai Golkar diganti oleh Tantowi Yahya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin di Gedung DPR, sebelum Rapat Paripurna Senin (26/5)

Menurut TB Hasanuddin, informasi mengenai penggantian tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua FPG DPR Setya Novanto. “Saya dapat informasi lisan dari Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Pak TB, Agus Gumiwang selaku Wakil Ketua Komisi I DPR diganti Tantowi Yahya,” ungkap TB Hasanuddin mengutip kata Setya Novanto.

Pimpinan Komisi I dari FPDI Perjuangan ini enggan menjawab mengenai alasan penggantian tersebut, apakah berkaitan dengan dukungannya kepada Jokowi-JK. “Pak Setya tidak menjelaskan alasannya,” tukasnya dengan mengatakan, penggantian pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan Pimpinan partai.

Ditegaskan kembali, informasi penggantian Agus Gumiwang sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR dan digantikan Tantowi Yahya diperoleh dari Ketua FPG dan baru merupakan informasi lisan dan belum ada surat resmi. Berdasarkan informasi, dukungan pencapresan Prabowo-Hatta oleh Ketua Umum Gol-



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

kar ARB berdampak pada beda sikap intern partai tersebut sehingga kader Golkar yang menduduki jabatan struktural diminta untuk mengundurkan diri. (mp) foto:iwan armanias/parle/hr.



Wakil Bicara



Anggota Komisi X DPR RI Dedi S Gumelar

“Pemerintah jangan terkonsentrasi di salah satu daerah wisata yang sudah eksis, misalnya Bali. Pemerintah harus mendorong daerah yang memiliki daya saing pariwisata internasional untuk dapat berkembang dan menjadi tujuan wisata. Walaupun itu wilayah otonomi daerah, namun pemerintah pusat bisa memberikan advokasi ataupun supervisi terhadap perkembangan daerah tersebut”

“Di Komisi IX dan Badan Anggaran, kami akan usulkan agar Pemerintah mencari alternatif-alternatif penerimaan baru dan sumber-sumber pajak baru. Jangan sampai adanya koreksi penerimaan pajak Rp 69 triliun pada APBN-P 2014, nanti malah akan mengoreksi jumlah utang yang kian bertambah.”



Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi



Wakil Ketua DPR Taufik Kuriniawan

“Timwas Bank Century DPR akan memberikan yang terbaik sebelum mengakhiri masa tugasnya 20 September 2014. Karena itu pada masa sidang keempat ini Timwas mengundang Tim Asset Recovery, 11 Juni *on the spot* ke Bank Mutiara dan 18 Juni rapat membahas penggantian dana nasabah Antaboga serta terakhir 25 Juni, mengundang KPK bahas *Progress Report* penanganan tindak pidana korupsi kasus Century.”

Perlu Realisasikan Target Kerja Sama Antar Parlemen

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Tetty Kadi Bawono meminta setiap kesepakatan yang telah diambil dalam setiap kerja sama antar parlemen dilaksanakan dengan penuh komitmen. Termasuk kesepakatan yang akan diambil dalam Sidang *Standing Committee on Economic Affairs - Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Jakarta, 2-5 Juni yang akan datang.

“Kalau kita sudah mengeluarkan *statement* dalam pertemuan antar negara maka saya rasa kita harus konsisten. Kita perlu komit harus dijaga bagaimana implementasinya jangan main-main. Nah kita di DPR tentu akan mengawasi kinerja eksekutif dalam mencapai target itu,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/14).

Isu kemiskinan yang menjadi sorotan dalam Sidang APA di Jakarta karena mayoritas penduduk miskin dunia saat ini ada di kawasan Asia dan terpusat di kawasan Asia Selatan. Secara umum kemiskinan di beberapa negara Asia disebabkan oleh tekanan penduduk terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas dan masih lemahnya *good governance*.

Di Indonesia menurutnya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dan masuk dalam program MDGs 2014 dan dilanjutkan pada tahun 2015. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah data kemiskinan. “Kita punya data dari BPS juga Bappenas, bagi saya yang penting kita punya *data base*



Anggota BKSAP DPRRI Tetty Kadi Bawono.

yang valid. Kita juga sudah mengesahkan UU tentang Fakir Miskin yang disitu mengamanatkan agar pemerintah menyelesaikan masalah fakir miskin ini,” paparnya.

Agenda lain yang juga menarik menurut Tetty adalah bagaimana Organisasi Parlemen Negara-negara Asia ini menyikapi masalah sumber daya energi termasuk energi baru dan terbarukan. Masing-masing negara diharapkan dapat berbagi pengalaman tentang kebijakan yang telah dilaksanakan. Secara khusus ia memberikan apresiasi kepada Jepang yang baru saja mempersiapkan Energi Gelombang Air Laut dengan konsep lengkap mulai dari aspek teknis sampai pembiayaannya.

Indonesia sebenarnya juga memiliki energi panas bumi yang belum

optimal dikembangkan. Ia berharap penanganannya tidak mandeg seperti pengembangan energi minyak jarak atau program energi surya. “Jadi masalah energi terbarukan dan bagaimana marketnya inilah yang akan disepakati oleh negara peserta,” kata wakil rakyat yang pernah populer sebagai artis ini.

APA yang dibentuk pada tahun 2006 ini menurutnya juga akan membicarakan isu seputar permasalahan lingkungan, pemanasan global dan perubahan iklim. Ia berharap di dalam negeri program penanaman sejuta pohon benar-benar berjalan sesuai harapan bukan sekedar target diatas kertas sehingga bisa sejalan dengan program serupa untuk kawasan Asia - *Planting Billions of Trees Throughout Asia*.

Anggota Kaukus Parlemen Perempuan ini menyebut dalam Sidang *Standing Committee on Economic Affairs - Asian Parliamentary Assembly (APA)* delegasi bisa saling bertukar pengalaman tentang program legislasi yang dapat mendukung eksekutif dalam menuntaskan target yang telah disepakati.

Sejauh ini 9 negara sudah menyatakan akan hadir dalam sidang ini diantaranya Arab Saudi, Pakistan, Srilanka, Bahrain, Yordania, Iran dan Kamboja. “DPR tentu berharap dukungan dari masyarakat agar seluruh rangkaian persidangan bisa berjalan lancar,” demikian Tetty. (iky) *foto:andry/parle/hr.*

Hubungan Ekonomi dengan Pakistan Sangat Baik

Nilai ekspor Indonesia ke Pakistan sangat tinggi. Sebaliknya impor Indonesia dari Pakistan justru sangat rendah. Posisi ini sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Maka, tak salah penilaian hubungan dengan Pakistan sangat positif dan baik.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai

menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Attia Mahmood di ruang kerjanya, Kamis (22/5). Attia merupakan Dubes Pakistan yang baru untuk Indonesia. Kunjungannya untuk memperkenalkan diri sekaligus mengundang Ketua DPR untuk hadir dalam pertemuan *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Pakistan Juni mendatang.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Pakistan sebetulnya sudah menyiapkan diri menyambut kehadiran Marzuki dalam pertemuan tersebut. Namun, Marzuki mengaku tidak bisa hadir. “Setelah Pilpres nanti kalau ada kesempatan saya akan ke Pakistan,” akunya.

Menyangkut hubungan perdagangan kedua negara, Indonesia bisa memanfaatkan Pakistan sebagai pasar potensial. “Pakistan bisa kita manfaatkan sebagai negara tujuan ekspor dalam rangka memperkuat ekspor kita, memperbesar devisa untuk kemajuan ekonomi Indonesia,” harap Marzuki.

Mengomentari demokratisasi yang berkembang di Pakistan, Marzuki menilai, sangat luar biasa. Sudah dua kali perdana menteri adalah wanita. Padahal Pakistan adalah negara Islam. “Artinya, Islam itu tidak menafikkan seorang wanita menjadi pemimpin. Menurut saya, itu demokrasi yang sangat bagus di Pakistan. Walau ada hiruk pikuk, tapi sangat demokratis.” (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Bersama APA Bahas Solusi Kemiskinan Asia

DPR RI mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Sidang *Standing Committee on Economic Affairs - Asian Parliamentary Assembly (APA)*. Salah satu isu utama yang dibahas dalam sidang ini adalah upaya mengurangi kemiskinan melalui pembangunan berkesinambungan. Acara yang akan diikuti oleh sejumlah parlemen dari negara-negara Asia ini berlangsung tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta.

“Masalah kemiskinan ini masih menjadi masalah utama di Asia, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mensyaratkan kemakmuran dan stabilitas politik. DPR berharap dalam Sidang APA ini kita mampu merumuskan sebuah langkah bersama untuk memecahkan masalah-masalah tersebut,” kata Surahman Hidayat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR di Jakarta, Kamis (22/5/14).

Ia menambahkan disamping masalah kemiskinan Sidang Komisi Tetap Organisasi Parlemen Negara-negara dari Kawasan Asia ini juga akan membahas sejumlah isu ekonomi terkini terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, pemanasan global dan perubahan iklim, sumber daya energi



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat.

termasuk energi baru dan terbarukan, serta kerjasama dalam bidang keuangan antara negara-negara anggota APA.

Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian publik di tanah air dan manca negara adalah *Global Warming, Climate Change and Planting Billions of Trees throughout Asia*. Diketahui bahwa yang akan terkena dampak pemanasan global dan perubahan iklim paling besar adalah negara pesisir

pantai, negara kepulauan, dan negara yang kurang berkembang seperti yang terletak di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

“Kita sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang dan terletak di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan kuat terhadap agenda ini sehingga sangat menarik untuk membahas mengenai langkah-langkah kolejal yang dapat diambil guna mengatasi masalah lingkungan hidup,

perubahan iklim dan pemanasan global di kawasan," ujar Politisi Fraksi PKS DPR ini.

Standing Committee ini diharapkan akan menghasilkan Draf Resolusi yaitu *Integrated Energy Market in Asia, Alleviating Poverty in Asia, Environmental Issues, Global Warming, Climate Change and Planting Billions of Trees throughout Asia, dan International Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliament*. DPR menurutnya telah menyiapkan sejumlah isu penting melengkapi resolusi tersebut.

Setelah disepakati Sidang Komisi Tetap di Jakarta rancangan resolusi tersebut akan diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno APA ke-7 tahun ini yang rencananya diadakan di Kamboja. Seluruh kesepakatan menjadi bagian dari *Resolution on International Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliaments*.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan agar seluruh rangkaian sidang ini dapat berjalan lancar. Keberhasilan ini akan menambah daftar keberhasilan DPR dalam melaksanakan sidang-sidang penting seperti Sidang Pleno APA ke 3 di

Jakarta tahun 2008, Sidang Pleno ke - 4 di Bandung tahun 2009, *APA Conference on Principles of Friendship and Cooperation* di Solo tahun 2011. Indonesia juga pernah memegang posisi Presiden APA selama dua tahun yaitu tahun 2010-2012, yang dijabat oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

"Ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang ini merupakan bukti bahwa Indonesia mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Peluang ini tentu saja harus kita manfaatkan sebaik mungkin," demikian Surahman. (iky) *foto:eka hindra/parle/hr.*

RDP Komisi II Hasilkan 2 Kesimpulan



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

Terkait Anggaran, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan beberapa mitra kerjanya yaitu Kemendagri, KemenPan&RB, KemenSetneg, Sekab,BPN, BKN, LAN, Arsip Nasional RI, Ombudsman RI, BNPB, KPU dan Bawaslu di DPR, Jakarta, Kamis (22/5) hasilkan 2 kesimpulan.

Kesimpulan pertama yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, Komisi II DPR RI telah mencatat usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dari seluruh Mitra Kerja Komisi II

DPR RI yang untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.

Dan kedua, Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI untuk melakukan simulasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2014 masing-masing, untuk menyikapi kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang hasilnya segera dapat diserahkan kepada Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan datang. (nt), *foto : riska/parle/hr.*

Pilpres Diharapkan Berjalan Lancar

Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menghadirkan dua pasang calon diharapkan berjalan lancar dengan mengusung semangat pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Di sinilah dibutuhkan para penyelenggara pemilu yang amanah.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie di ruang kerjanya usai menerima Dubes Pakistan, Kamis (22/5). Penyelenggaraan Pilpres diharapkan tidak seperti pemilu legislatif yang lalu, di mana banyak penyelenggara pemilu yang tidak amanah bekerja. Dari sisi logistik, persiapan Pilpres tampaknya lebih baik ketimbang pemilu legislatif. Dalam Pilpres tak perlu ada kekhawatiran surat suara tertukar, karena tidak ada dapil.

"Penyelenggara pemilu yang tidak amanah melaksanakan tanggung jawabnya berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau merasa honorinya kecil



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

sehingga menghalalkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual suara, sebaiknya tidak usah menjadi petugas TPS, PPS, maupun PPK, daripada mengkhianati rakyat dan merusak nilai-nilai demokrasi,” tandas Marzuki.

Ketika ditanya penilaiannya terhadap dua pasang capres, Marzuki mengatakan, ia tidak dalam kapasitas menilai mana

yang baik dari dua pasang tersebut. “Tidak ada alternatif lain untuk kita bersikap dan tidak boleh golput memberikan suara di antara dua ini. Saya tidak dalam kapasitas memberi penilaian mana yang baik dan tidak baik. Sebagai ketua DPR saya harus berada di tengah-tengah. Tapi, kalau sebagai anggota tim sukses pasti akan membantu salah satu pihak,” ungkap Marzuki. (mh), foto : naefurodjie/perle/hr.

Selidiki Tingginya Surat Suara Tidak Sah Pileg 2014

Komisi II DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dan mengkaji terkait masih tingginya surat suara yang tidak sah, berikut formulir C1, Formulir D, Formulir DA1 dan Formulir DB yang bermasalah pada Pileg 2014, agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 mendatang.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, saat RDP dengan jajaran Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (21/5).

Selanjutnya, dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR RI memberikan catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang masih banyak kecurangan serta politik uang yang masif dan sistematis di beberapa daerah, termasuk



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu.

“Apabila terdapat perangkat Bawaslu yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu untuk mengambil langkah tegas dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Arif.

Komisi II DPR RI, menurut politisi F-PDIP ini juga, meminta kepada Bawaslu untuk memberikan laporan secara lisan dan tertulis yang menjelaskan keseluruhan pengawasan Pemilu Legislatif 2014 secara rinci, komprehensif dan obyektif yang dapat menyakinkan Komisi II DPR RI bahwa Bawaslu akan mampu mengawasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lebih berkualitas, jujur dan adil.

Dan tambahnya, dalam rangka persiapan pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis serta memperkuat perangkatnya terutama di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi kecurangan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR RI untuk dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya. (nt) foto:eka hindra/parle/hr.

STPI Curug Diharap Hasilkan Pilot Bagi Pasar Domestik

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengharapkan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug dapat menghasilkan lulusan pilot lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga pilot di Indonesia.

“Kita bangga ada Sekolah Tinggi Penerbangan di Indonesia dan mendorong terus agar dapat memenuhi harapan kita semua,” ujarnya saat diwawancarai oleh Parlemen ketika Kunjungan ke STPI Curug baru-baru ini.

Menurutnya, kunjungan ke STPI dalam rangka melihat langsung hambatan yang ada. “Saat ini pertumbuhan pilot di Indonesia tidak seimbang dengan pilot yang ada,” katanya.

Kendala yang ada, lanjut Muhidin, yaitu jumlah pesawat



Anggota Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug.

latih yang masih minim, selain itu instruktur juga masih kurang. “Seorang calon pilot memerlukan 150 jam terang masalah lainnya yaitu penyediaan pesawat latihan yang dikenakan pajak tinggi,” ujarnya.

Dia menegaskan, beberapa tahun kedepan kita mengharapkan tidak ada lagi pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Kita meminta BP SDM dan Kepala Sekolah STPI mem-

buat perencanaan lima tahun kedepan, seperti prasarana dan pesawat yang memadai,” katanya.

Terkait tingginya pajak pengiriman pesawat latihan, Dia menambahkan, Komisi V DPR akan membicarakan persoalan itu dengan Komisi XI DPR sehingga pajak pembelian pesawat latihan dapat diberikan kelonggaran. (Sugeng Irianto), foto : andry/parle/hr.

DPR Dukung Peningkatan Fasilitas STPI Curug

Komisi V DPR mendukung peningkatan sarana dan prasarana di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug. Pendapat itu disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi V DPR saat Kunjungan Kerja ke STPI Curug, Rabu, (21/5).

Anggota DPR Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) mengatakan, kita harus segera menyiapkan SDM yang mumpuni dibidang penerbangan. Karena memang visi kita yaitu sebagai salah satu pemersatu Indonesia.

“Kita akan memberikan dukungan penuh terhadap STPI untuk meningkatkan kinerja sekolah tersebut,” terangnya.

Menurutnya, kebutuhan Pilot di Indonesia mencapai 400-500 pilot sementara jebolan STPI baru 150 orang pertahun kemudian sisanya dari pihak swasta. “Kita harapkan jangan lagi terjadi pilot asing yang bekerja di In-



Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi.

donesia lebih besar dibandingkan pilot kita,” ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi V DPR akan berkoordinasi dengan Bapennas untuk segera mengalokasikan ang-

garan untuk kemajuan STPI. “Infrastruktur merupakan tulang punggung Indonesia dan kita harapkan kita dapat meningkatkan profesionalitas kita dibidang tersebut,” katanya. (Sugeng Irianto), foto : andry/parle/hr.

Dharma Wanita Persatuan Kelompok III Gelar Seminar Ekonomi

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPR RI sebagai bagian dari DWP Instansi Pemerintah Pusat Kelompok III, Rabu (22/5) mengundang Pakar Marketing, Rhenald Kasali untuk memaparkan langkah bijak dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga.

“Selain seminar atau ceramah-ceramah, ibu-bu Dharma Wanita Persatuan ini perlu latihan-latihan dan kunjungan yang sifatnya praktek,” ungkap Rhenald Kasali.

Menurutnya, untuk meningkatkan kemandirian, para mahasiswanya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditugaskan mengunjungi negara lain lewat usahanya sendiri. Sementara ibu-ibu anggota DWP, untuk meningkat-



Ketua DWP Setjen DPR RI, Titik Djuned bersama Rhenald Kasali dan Triana Djaka.

kan kemandirian ekonomi bisa melakukan tindakan nyata, misalnya dengan lomba membangun usaha atau produk kewirausahaan.

Setelah setahun atau dalam jangka waktu tertentu usaha tersebut dinilai atau dibandingkan satu sama lain. Usaha yang lebih berkembang itulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Dari lomba tersebut menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, ke depan-

nya dapat langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kemudian dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Anggota DWP Setjen DPR RI, Triana Djaka menyambut positif masukan tersebut. Lebih lanjut hal tersebut akan dikomunikasikan kepada anggota DWP Kelompok III lainnya untuk pengimplementasiannya. (Ayu) foto: rizka/parle/hr.

Waspadai Virus Mers, Petugas Kesehatan Harus Tegas

Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso mengingatkan, makin merebaknya virus Mers perlu disikapi dengan penuh kewaspadaan, apalagi sebentar lagi datang musim haji. Pemerintah Arab Saudi yang telah menerbitkan *travel advice*- nasihat untuk perjalanan, perlu dipatuhi oleh para dokter dan paramedis Indonesia.

“Dokter dan petugas kesehatan harus tegas, kalau seseorang berpenyakit kronis dilarang berangkat umroh atau haji, jangan sampai diloloskan,” tandas anggota Dewan yang berprofesi dokter kepada Parlemen di Jakarta, baru-baru ini.

Travel advice yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi itu diantaranya umur 65 tahun keatas tidak boleh berangkat haji atau umrah, usia dibawah 12 tahun, orang berpenyakit kronis seperti diabetes, stroke, dan gagal ginjal juga tidak boleh pergi ke Arab Saudi.

Selaku anggota Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama dan pemberdayaan perempuan, Sumarjati menyaksikan sendiri sebanyak 80 orang jemaah haji Indonesia melakukan cuci

darah di Rumah Sakit Madinah, juga ada penderita diabet, tetap bisa berangkat.

“Sehubungan merebaknya virus Mers ini, saya tekankan para dokter dan petugas kesehatan di Indonesia harus disiplin, ketat. Kalau diindikasikan berpenyakit kronis, tetap dilarang dan tidak boleh pergi ke Arab Saudi. Sebaiknya pergi sehat, pulang juga sehat,” tegas Sumarjati.

Anggota DPR Imam Suroso menghimbau pemerintah untuk memberi perhatian lebih serius terhadap kasus virus Mers, karena sudah banyak membawa korban jiwa baik di Arab maupun jemaah Indonesia sepulang dari umroh. “Saya tegaskan, bagi yang mau umroh kalau badannya tidak fit, diurungkan saja. Tubuh yang tidak sehat rentan terserang virus Mers,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Begitu pula jemaah yang pulang umroh, kalau badannya tidak enak, hukumnya wajib untuk segera periksa ke dokter, supaya tidak merajalela sehingga tidak membias ke tanah air tercinta ini. Bahkan semua orang yang tiba dari Arab Saudi perlu memerik-



Anggota Komisi VIII DPR RI Imam Suroso.

sakan kesehatannya ke rumah sakit dan diberi suntikan anti bodi.

lapun mendesak rumah sakit untuk menyiapkan vaksin khusus guna mengobati penderita pasien yang terserang Mers. “Petugas rumah sakit, puskesmas dan para kepala dinas kesehatan harus siaga satu karena Mers ini lebih berbahaya dibanding virus lainnya. Kalau perlu, Dewan mendorong pemerintah untuk mengucurkan anggaran penanggulangan virus. Intinya Pemerintah harus pro aktif,” ungkap Imam Suroso. (mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPT Pilpres Diduga Bermasalah

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 9-10 juta pemilih yang diduga ganda dalam Pemilu Legislatif lalu, hal ini terkait penyusunan DPS berbasiskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif (Pileg) yang sebelumnya juga berma-

salah.

“Data ganda itu dipicu adanya nama yang sama antara calon pemilih disatu daerah dengan daerah lain, oleh karena itu kami minya KPU harus cermat dalam menyusun DPS Pilpres yang saat ini masih dalam tahap perbaikan,”

kata Arif saat memimpin RDP dengan KPU di DPR, Jakarta, Rabu (21/5).

la menambahkan menghadapi pilpres, pembersihan data ganda itu mutlak, dan jika KPU gagal menyusun DPT yang *clear and clean* dalam pilpres, hal itu dapat menjadi bumerang. Sebab

dalam situasi pilpres yang *head to head* antara dua kubu, bisa dipastikan pertarungan akan sangat keras. Sehingga ketidakakuratan data apa pun akan dijadikan sebagai biang keladi kekalahan kubu tertentu.

Sebelumnya, dalam penjelasannya dihadapan Komisi II DPR, KPU memprediksi jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang berkisar 190 juta orang. Jumlah itu meningkat 3,1 juta dari daftar pemilih tetap dalam pemilu legislatif.

“Meskipun KPU belum mendapatkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DP-SHP), yang pasti, KPU memprediksi jumlah pemilih DPSHP untuk pemilu presiden dan wakil presiden kurang lebih 190 juta,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik,

Saat ini, KPU sedang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

pemilih untuk pemilu presiden mendatang. KPU telah melewati tiga tahapan, yaitu penetapan daftar pemilih sementara (DPS), pemutakhiran DPS, dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Husni mengatakan, KPU juga menjadikan DPT pileg lalu sebagai DPS

Pilpres 2014. Beberapa hari setelah pemungutan suara pemilihan legislatif, lanjut Husni, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data tambahan WNI yang akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu 10 April 2014-9 Juli 2014.

“Pada tanggal 15 April 2014, KPU menerima data pemilih tambahan untuk pemilu presiden dan wakil presiden sekitar 3,1 juta. Oleh KPU, data itu didistribusikan kepada masing-masing KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara),” ujarnya.

Setelah dilakukan pencocokan, DPSHP ditetapkan PPS pada tanggal 12 Mei 2014 lalu. Saat ini, lanjut Husni, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi sedang melakukan rapat rekapitulasi DPSHP pilpres di masing-masing tingkatan. Rekapitulasi dijadwalkan dilakukan pada 23-25 Mei 2014. (nt), foto : rizka/parle/hr.

Komisi II Beri Catatan Serious Pileg 2014



Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghasilkan tiga kesimpulan. Kesimpulan itu dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo (FPDIP) yang memimpin RDP Komisi II DPR dengan jajaran Komisioner KPU di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/5).

Kesimpulan pertama, kata Arief, Komisi II DPR memberikan catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) 2014. Pileg dianggap masih banyak kecurangan serta politik uang yang masif dan sistematis di beberapa daerah, termasuk penyelewengan terhadap peraturan

perundang-undangan pemilu.

“Apabila terdapat perangkat KPU yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, Komisi II meminta KPU mengambil langkah tegas dan meindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Kedua, Komisi II DPR meminta kepada KPU untuk memberikan laporan secara lisan dan tertulis. Laporan itu wajib menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pileg 2014 dengan rinci, komprehensif dan objektif yang dapat meyakinkan Komisi II DPR.

Ketiga, dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014, Komisi II DPR meminta kepada KPU untuk mempersiapkan dan membenahi perangkatnya secara maksimal. Hal itu demi menghindari kecurangan dan potensi konflik yang mungkin akan terjadi. Diharapkan KPU melaporkan kepada Komisi II DPR proses pelaksanaan pilpres untuk dibahas pada RDP selanjutnya. (nt), foto sofyan effendi/parle/hr.

Herman Kadir Minta Bentuk Pansus Pemilu

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas evaluasi Pemilu Legislatif (Pileg) dan persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada sesi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Herman Kadir meminta dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pemilu.

“Pileg 9 April sangat amburadul, dari TPS masih banyak laporan, pelanggaran pemilu dilakukan penyelenggara di TPS, KPPS, KPPK, KPUD dan sebagainya. Kecurangan itu berlangsung secara struktural, maka perlu pansus pemilu,” tegas Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Herman Kadir di Gedung DPR Jakarta, Rabu (21/5).

Dibentuknya Pansus Pemilu menurut dia diperlukan karena Pileg 2014 ini berjalan kacau dan akan berbahaya pada pemilu Presiden mendatang.

Senada dengan Herman, Anggota Komisi II DPR Abdul Wahab Dalimunthe dari Fraksi Partai Demokrat membenarkan bahwa Pileg saat ini penuh dengan kecurangan. “KPU harus lapang dada menerimanya, ini memang amburadul. Banyak yang abal-abal,” ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi II DPR Muhammad Unais Ali Hisyam dari PKB juga mengibaratkan Pemilu itu layaknya pembelian umum. “Ada kandidat dan penyelenggara. Pen-



Anggota Komisi II DPR RI Herman Kadir.

jualnya penyelenggara dan pembelinya kandidat,” tambah Unais.

Rapat kali ini yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo (FPDIP) dihadiri Ketua KPU Husni Kamil Manik serta komisioner KPU lainnya, seperti Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Juri Ardiantoro. (nt), foto : sofyan effendi/parle/hr.

Sekretariat Jenderal Harus Mandiri

Himbauan agar Sekretariat Jenderal DPR RI mandiri, tidak bergantung kepada lembaga eksekutif, mengemuka dalam pembahasan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Begitu pula Sekretariat Jenderal MPR dan DPD harus menunjukkan kemandiriannya, karena berada di lembaga legislatif.

Rapat Pansus Pembahasan Revisi UU MD3 menghadirkan tiga Sekjen dari tiga lembaga legislatif, masing-masing MPR, DPR, dan DPD. Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Nurul Arifin (F-PG), didampingi Wakil Ketua Fakhri Hamzah (F-PKS) dan Ketua Pansus Benny K Harman (F-PD). Rapat bertujuan menerima masukan konstruktif dari ketiga Sekjen, untuk merumuskan RUU MD3 yang baru.

“Saya sepakat kesekjenan harus mandiri. Sekarang itu kami merasa mandiri,



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti.

karena konsultasi semua pekerjaan ke Pimpinan DPR. Tidak pernah ke pemerintah,” tegas Sekretaris Jenderal DPR

RI Winantuningtyastiti, usai rapat Pansus, Rabu (21/5). Yang mungkin masih terikat dengan eksekutif lebih kepada

persoalan administrasi belaka, karena eksistensinya sebagai PNS yang terikat dengan beberapa UU menyangkut aparatur dan keuangan negara.

Banyak UU yang mengikat pejabat PNS di semua lembaga, seperti UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan lain-lain. “Memang kesekjenan itu terikat oleh beberapa UU. Kesekjenan, kan, PNS. Banyak sekali yang mengikat dan ha-

rus ditaati semua oleh kami,” jelas Win.

Sebagai pegawai yang sudah mendikasikan dirinya di DPR selama 33 tahun, Win mengaku, sudah menjadi bagian dari DPR. Dia juga bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Tidak mungkin atasannya ada di pemerintahan. “Jadi, saya merasa betul-betul bagian dari DPR,” aku Win.

Sementara itu, pada bagian lain,

ketika ditanya soal wacana penggabungan tiga sekretariat jenderal di lembaga legislatif, Win berpendapat, bila konteksnya efisiensi, penggabungan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD menjadi keniscayaan. Namun, ketika melihat sifat pekerjaannya, sebaiknya sekretariat tetap terpisah. Bila digabung menjadi satu sekretariat, dikhawatirkan efektifitas pekerjaan ketiga lembaga terganggu. (mh), foto : agung.sulistiono/parole/hr.

Parlemen Remaja Perlu Digelar Dua Kali Setahun

Program Parlemen Remaja yang sedang berjalan dengan menghadirkan 136 siswa SLTA dari 34 provinsi merupakan wahana pendidikan politik yang sangat strategis. Program yang berjalan satu tahun sekali ini, perlu digelar menjadi dua kali setahun.

Demikian diusulkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, usai memberi sambutan kepada peserta Parlemen Remaja di *Operation Room* DPR RI, Selasa (20/5). Pihaknya sangat mengapresiasi program yang digagas Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Program tersebut sudah yang kedelapan kali digelar.

“Parlemen remaja ini acara yang sangat bagus. Sebagai salah satu Pimpinan DPR, saya memberi dukungan penuh, termasuk kalau satu tahun diadakan 2 (dua) kali. Ini akan memberi semangat dan dorongan kepada anak-anak kita dari seluruh pelosok negeri untuk mengenal demokrasi dan parlemen kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” papar Pramono.

Generasi muda perlu dibekali pendidikan politik yang memadai, agar kelak ketika menjadi penyelenggara negara mereka bisa mengelola negara dengan baik dan membangun bangsa menjadi lebih besar. Selain pengetahuan politik, para peserta juga diajak melihat langsung rapat-rapat kerja di DPR RI termasuk Rapat Paripurna. Simulasi menjadi materi lainnya, bagaimana para peserta mampu mempraktikkan posisinya sebagai anggota parlemen.

Menurut Pramono, “Ini merupakan pendidikan politik yang baik bagi anak-anak kita. Acara ini harus tetap dilanjutkan. Sebagai negara demokrasi terbesar yang sedang mengalami pematangan, pengenalan politik sejak awal menjadi penting sekali. Dengan demikian, kalau mereka sudah mengenal dunia politik itu akan memberikan manfaat dan stimulan bagi mereka untuk rajin belajar. Negeri ini sangat luas.”

Pramono juga sangat senang meli-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

hat antusiasme para peserta. Mereka, nilai Pramono, sangat luar biasa. Sebagian peserta mungkin ada yang belum pernah ke Jakarta. Dengan mengikuti program Parlemen Remaja, diharapkan ada dorongan semangat untuk terus mau belajar. “Ini akan membekas selama hidupnya dan akan diceritakan kembali 20 tahun ke depan,” kata Pramono. (mh), foto : andri/parole/hr.

Tersangka Kasus Century Akan Diadili *In-Absentia*

Polri telah melakukan penyelidikan terhadap 41 berkas perkara kasus Century, sebanyak 31 berkas masih dalam proses sedangkan 4 berkas lainnya, karena tersangkanya melarikan diri yaitu Anton Tantular, Dewi Tantular, Hendro Wiyanto dan Hartawan Aluy

berkasnya masih ditangani lebih lanjut.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal (pol) Sutarnan dalam rapat kerja dengan Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Rabu (21/5).

Mengutip salah satu kesimpulan Rapat Timwas Century 11 Desember 2013, Polri dan Kejaksaan Agung diminta mempercepat proses hukum terhadap para pelaku kasus Bank Century, polri telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Menurut

Sutarman, dalam rangka penyelesaian berkas perkara tersangka yang melarikan diri tersebut, polri telah bekerja sama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dengan Interpol.

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Interpol telah menerbitkan *red notice* terhadap tersangka yang melarikan diri atas nama keempat nama tersebut. Kemudian lanjut Kapolri, pada Januari lalu, polri telah mengirim delegasi ke Singapura untuk melakukan koordinasi dan membicarakan proses penangkapan dengan otoritas pemerintah terhadap tersangka Hartawan Aluy.

“Jadi posisi Hartawan Aluy sekarang diketahui di Singapura. Namun Singapura menolak menyerahkannya dengan alasan belum ada perjanjian ekstradisi dan belum ada alat bukti aliran dana hasil kejahatan ke negara tetangga itu,” kata Sutarman.



Suasana Rapat Timwas Century DPR.

Sedangkan ketiga tersangka lainnya hingga kini keberadaannya belum diketahui dan masih terus bekerja sama dengan 196 negara yang tergabung dalam Interpol untuk melacak tiga tersangka itu. Dikatakan Kapolri, proses penyidikan dan persidangan Hartawan

Aluy dan kawan-kawan akan dilakukan secara *in-absentia*. Sebelumnya polri telah memproses dan mengirim surat panggilan kepada tersangka melalui Kedubes RI di Singapura namun tersangka tidak hadir. (mp), foto : eka hindra/parle/hr.

Rakyat Harusnya Marah Kalau Disuap

Anggota Komisi X DPR RI Dedy Gumelar menyampaikan rasa prihatin menyaksikan fenomena suap dan sogok yang terjadi pada pemilu legislatif lalu. Ia menekankan kalau dibiarkan tradisi yang terjadi hampir disetiap pemilu ini bisa menjadi budaya yang cepat atau lambat akan menggerogoti kemandirian bangsa ini.

“Rakyat sekarang kalau melihat hakim dan jaksa disuap marah, polisi disogok marah. Tapi kalau dirinya sendiri disogok, disuap oleh calon anggota DPR *enggak* marah, *enggak* milih dia. Ini memprihatinkan dan itu yang akan membuat rusak budaya bangsa,” katanya saat bicara dalam acara Parlemen Remaja di Kopo, Jabar, Minggu (18/5/14).

Politisi FPDIP ini berada di tengah peserta Parlemen Remaja yang berasal dari 34 provinsi dalam rangka memberi bekal terkait pembahasan RUU Kebudayaan yang juga sedang dibahas di Komisi X. Salah satu tujuan perlu hadirnya produk legislasi ini menurutnya untuk meneguhkan jati diri bangsa.

Salah satu langkah penting untuk menjaga budaya bangsa ini adalah perlunya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang didukung politik anggaran yang kuat. “Kalau bangsa ini mau hebat, satu-satunya jalan adalah Kementerian Kebudayaan harus berdiri sendiri sehingga memiliki politik anggaran yang kuat. Sekarang dari Rp86 triliun anggaran Kemendikbud hanya Rp1,2 triliun untuk kebudayaan. Jadi kita perlu paksa bangsa ini membangun kebudayaan sebagai akar bagi pembangunan bangsa kedepan,” tandasnya.



Anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar saat diwawancara wartawan.

Ia menyebut keberhasilan Korea Selatan dalam membangun kebudayaan sehingga kemudian menjadi alat untuk membentuk citra bangsa dan negaranya. “Negara dan pemerintah Korea memandang perlu membangun seni dan budaya dengan anggaran memadai. Coba kita lihat hasilnya *Gangnam Style* sudah menjadi PR membentuk citra bangsa dan negaranya,” ungkap anggota Bagito Grup yang akrab disapa Miing ini.

Dengan hadirnya RUU Kebudayaan upaya untuk meredam serbuan budaya asing diharapkan bisa optimal. “Kita boleh menyukai *K-Pop*, *Shakira*, *Beyonce*, *the Beatles* tapi kita tidak boleh meninggalkan akar budaya bangsa kita,” pungkas dia disambut tepuk tangan peserta Parlemen Remaja. (iky), foto : ibnur khaliq/parle/hr.

DPR Apresiasi Aspirasi Mahasiswa

Ruang Rapat Komisi II dipenuhi setidaknya oleh 80 mahasiswa. Ini bukan demo, apalagi ruang rapat diduduki oleh mahasiswa. Namun, mahasiswa ini hendak menyampaikan aspirasinya terkait dinamika politik Indonesia. Mahasiswa ini datang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

“Masukan yang disampaikan kepada kami sangat bagus. Setidaknya, hal ini menunjukkan mahasiswa kita dan para staf pengajar, punya kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana mereka menanyakan otonomi khusus, apa yang terjadi di pemerintahan lokal, kemudian sistem politik yang mahal, partai politik yang belum bisa mandiri, merajalelanya politik uang yang semakin massif dan brutal. Banyak hal yang menjadi isu aktual yang menjadi bahan pembicaraan,” jelas Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo, usai pertemuan di Ruang Rapat Komisi II, Senin (19/05).

Di satu sisi, pihaknya meminta kepada mahasiswa dan para pengajar untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk tertulis, sehingga bisa menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat DPR.

“Kita minta kepada mereka untuk menyampaikan secara tertulis dan tertata dengan sistematis, semacam tulisan ilmiah. Itu bisa menjadi bahan masukan atau referensi untuk DPR, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang. Masukan dari mahasiswa dan para pengajar ini akan sangat berarti, dan yang terpenting, dari pertemuan ini dapat menumbuhkan sikap kembang dan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Politisi asal Dapil Jawa Timur ini menambahkan, mahasiswa yang diposisikan sebagai agen perubahan, diharapkan akan menimbulkan perubahan yang cepat di Indonesia. Mahasiswa dapat bersikap kritis sebagai penjaga demokrasi Indonesia.

“Posisi mahasiswa memang sebagai agen perubahan. Jika mahasiswa kritis



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo foto bersama Mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

dan memiliki inisiatif, maka perubahan akan semakin cepat. Mereka bersikap kritis itu dalam perspektif positif, tidak dalam kerangka permainan politik atau kepentingan memperoleh kekuasaan. Pada hakikatnya, mahasiswa penjaga demokrasi di kehidupan demokrasi Indonesia,” jelas Arif.

Pada kesempatan yang sama, salah satu dosen pembimbing, Ana Sabana Azmy menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ke DPR ini dalam rangka studi lapangan. Dari kunjungan ini diharapkan seluruh mahasiswa dapat mengetahui secara langsung kondisi politik di Indonesia.

“Maksud dan tujuan kami adalah kunjungan studi lapangan. Kami memasukkan kegiatan kunjungan ke DPR ini untuk mensinergikan antara teori di kampus, dengan kondisi praktik di lapangannya. Jadi, mahasiswa sebagai insan akademik itu tidak hanya mempelajari teori, namun juga mendapatkan informasi langsung dari Anggota DPR,” jelas Ana.

Ia mengakui, antusiasme mahasiswa berkunjung ke Kompleks Parlemen sangat tinggi. Sehingga, dari kunjungan ini terjalin komunikasi antara DPR RI dengan mahasiswa.

“Antusiasme mahasiswa ketika bela-

jar sosial politik, maupun terkait dinamika politik di Indonesia, ini menjadi perhatian dari mahasiswa. Diharapkan dari pertemuan ini, dapat terjalin komunikasi antara Anggota DPR dan mahasiswa. Bentuk komunikasi bukan dengan berdemo, tapi dengan diskusi itu akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga, para pejabat negara dapat bersinergi dengan mahasiswa selaku *agent of change*,” imbuh Ana.

Sementara itu, salah satu mahasiswa, Anisa Hidayati menyatakan bahwa selama ini mahasiswa UIN sudah sering melakukan pembahasan-pembahasan politik bersama mahasiswa dari kampus lain. Namun, hasil pembahasan itu belum tersalurkan kepada Anggota DPR.

“Dari hasil pembahasan itu, tidak tersalurkan ke DPR RI. Mungkin langkah selanjutnya, kami akan menyampaikan apa yang sudah kami bahas sesama mahasiswa, kepada Anggota DPR RI. Termasuk mempertemukan mahasiswa, baik UIN ataupun mahasiswa lain, sehingga aspirasi mahasiswa ini terdengar oleh Anggota DPR,” ujar Anisa.

Mahasiswa berkacamata ini mengakui mendapat banyak pencerahan dari berbagai penjelasan dari Anggota Komisi II DPR RI. Walaupun belum selu-



ruh penjelasan bisa didapatkan karena keterbatasan waktu, ia merasa pertemuan ini bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dengan Anggota DPR.

“Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan dari pertemuan ini, walaupun belum semua penjelasan dapat kami terima, setidaknya ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan, dan

mendapat penjelasan. Sehingga, ketika nanti kembali ke kampus, kami sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami di kampus,” imbuh Anisa. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

Oelfah : Parlemen Remaja Luar Biasa



Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto.

Anggota Komisi X DPR RI Oelfah A. Syahrullah Harmanto tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika usai menyampaikan materi hampir seluruh tangan dari 136 peserta Parlemen Remaja mengacung siap menyampaikan pertanyaan. Ketika sejumlah perwakilan akhirnya diberi kesempatan bertanya iapun menyampaikan apresiasi.

“Luar biasa sekali pertanyaannya, gigih dan bersemangat. Jadi tidak sekedar mengacung atau bersuara

karena kelihatan sekali pertanyaannya menukik tajam,” katanya saat menyampaikan paparan dalam acara Parlemen Remaja 2014 di Kopo, Jabar, Minggu (18/5/14).

Oelfah yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR ini menyampaikan materi tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR. Ia secara gamblang menjelaskan sistem multi partai yang telah membuat jumlah fraksi bertambah, sehingga ini menyulitkan dalam membuat keputusan dengan cepat.

“Berbeda dengan orde baru yang dulu hanya 3 partai sehingga rapat bisa berlangsung lebih cepat apalagi sistem yang dibangun waktu itu bernuansa militer, disiplin, sehingga rapat bisa dikatakan selalu *ontime*. Sekarang ada fraksi kecil yang kesulitan membagi anggotanya untuk mengikuti setiap rapat, ini jelas menurunkan kualitas rapat dan pengambilan putusan menjadi lebih lama,” lanjutnya.

Mantan mahasiswa terbaik nasional

ini mengakui wakil rakyat pada periode ini memang ada yang tidak berhasil menunjukkan prestasi sebagai anggota dewan yang baik. Akan tetapi ia meyakinkan dari 560 anggota dewan sebagian besar memiliki dedikasi dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Dalam sesi tanya jawab Dinul Fiqri siswa SMAN 1 Mataram, NTB mengajukan pertanyaan soal etika dalam berdebat. “Sebagian dari anggota DPR kelihatan tidak memahami bagaimana etika bicara termasuk ketika berdebat atau mengkritik. Saya ingat betul dalam rapat Century saat Ruhut bertanya kepada JK,” paparnya.

Sementara itu peserta dari Provinsi Papua Lisbeth Bosawer menanyakan tantangan sebagai anggota parlemen perempuan ditengah dominasi laki-laki. “Saya lihat dari *curriculum vitae* ibu sering bepergian bahkan ke sejumlah negara, bagaimana membagi waktu terutama membangun pengertian kepada keluarga,” tuturnya. (iky) foto:ibnur khaliq/parle/hr.

Alumni Parlemen Remaja adalah Duta DPR

136 peserta kegiatan Parlemen Remaja yang berasal dari 34 provinsi dinilai berhasil mengikuti program pengenalan tugas dan fungsi DPR. Mereka sukses mengikuti kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari penuh dilengkapi dengan praktek simulasi persidangan pengawasan dan legislasi anggota dewan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedewanan para peserta Parlemen Remaja sudah sepatutnya diangkat menjadi Duta DPR.

“Adik-adik bisa menjadi menjadi Duta DPR karena adik-adik adalah yang terbaik yang pernah belajar langsung dan

memahami bagaimana dinamika tugas kedewanan. Adik-adik diharapkan jadi tempat bertanya di rumah, sekolah, lingkungan bahkan provinsi masing-masing tentang bagaimana DPR itu sebenarnya. Jelaskan apa adanya karena bagaimanapun DPR adalah simbol demokrasi yang harus dijaga,” kata Kabiro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR, Djaka Dwi Winarko saat menutup secara resmi kegiatan Parlemen Remaja 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Sebelumnya seluruh peserta sudah mengikuti serangkaian simulasi persidangan maraton terkait penyelesaian

RUU Kebudayaan. Mereka juga menghimpun masukan dari budayawan Taufik Ismail dan Guru Besar dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Bambang Wibawarta. Dua anggota dewan dari Komisi X Dedy Gumelar dan Oelfa Harmanto turut memberikan arahan terutama tentang proses legislasi.

Djaka juga berharap para peserta yang merupakan siswa SMA/SMK/MA terbaik dari seluruh Indonesia dapat menjadikan kegiatan tahunan ini sebagai pelajaran berharga karena berkesempatan bertemu dan belajar langsung dari anggota dewan dan sejumlah tokoh nasional penting.



Karo Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko memberikan ucapan selamat kepada peserta Parlemen Remaja.

“Saya rasa ketika kita mendapat pelajaran dari budayawan Taufik Ismail itu kesempatan yang langka. Beliau menitipkan bangsa ini kepada adik-adik sekalian dengan emosional dengan meneteskan air mata,” pesannya.

Dalam simulasi sidang paripurna, peserta Parlemen Remaja berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kebu-

dayaan. Pembahasan berlangsung alot, sejumlah peserta rapat mengajukan interupsi keberatan sehingga pimpinan rapat memutuskan pengambilan putusan dengan voting pada pasal-pasal tertentu.

“Kalau adik-adik hari ini merasakan bagaimana letihnya, capeknya, berdiskusi, berdebat ya memang seperti itulah yang dirasakan oleh anggota

dewan kita. Sebagai anggota dewan harus memperjuangkan konstituenya, partainya, ini tidak mudah ketika harus bertemu dengan beragam kepentingan fraksi dan anggota dewan lain,” ujar Djaka.

Pada acara penutupan tersebut panitia pelaksana yang didukung penuh oleh tim dari Universitas Indonesia

menetapkan 5 orang peserta terbaik. Pemilihan berdasarkan dua kriteria utama yaitu keaktifan dan penguasaan materi.

Muhammad Nasrullah perwakilan dari Provinsi Gorontalo yang dinobatkan sebagai peserta terbaik kelima menyatakan kegiatan Parlemen Remaja adalah kesempatan emas untuk bertemu dan berargumentasi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. “Senang bertemu dengan teman dari seluruh Indonesia, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa,” ungkap dia.

Sementara Dina Ullistiya dari Provinsi D.I. Yogyakarta membuat pengakuan tentang persepsi yang salah selama ini tentang DPR. “Setelah mengikuti persidangan maraton, berdebat membahas RUU Kebudayaan dengan teman-teman dari seluruh daerah saya katakan ternyata sulit menjadi anggota DPR, tidak sesimpel ketika mengkritik atau mendemo mereka,” pungkas Dina. (iky), foto : andri/parle/hr.

Komisi VIII Pertanyakan Implementasi Sistem E-Hajj

Komisi VIII DPR mempertanyakan rencana penggunaan sistem E-Hajj yang telah digaungkan oleh Kementerian Agama sejak tahun lalu. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Senin (19/5) di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta.

“Kami ingin mengetahui apakah E-Hajj sudah dapat digunakan atau diimplementasikan dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2014 nanti. Ini sangat penting demi sebuah transparansi,” tanya Ace kepada Dirjen PHU, Anggito Abimanyu.

Dijelaskan Politisi dari Fraksi Golkar ini, bahwa selama ini proses pengadaan pemondokan Kementerian Agama Indonesia di tanah suci masih bersifat manual. Dalam arti, jika ingin melakukan kontrak dengan pihak swasta (pemilik pondokan di tanah

suci), maka pihak Kemenag harus datang. Namun dengan E-Hajj cukup dengan menggunakan teknologi informasi sudah mengetahui letak pemondokannya dimana, spesifikasinya bagaimana, dan harganya berapa. Sehingga proses *bidding* atau tender dapat dilakukan secara terbuka dan tidak terkesan sembunyi-sembunyi.

Sementara itu Dirjen PHU Kementerian Agama, Anggito Abimanyu mengakui bahwa sistem E-Hajj akan mengantisipasi timbulnya fitnah dan syak wasangka. Namun saat ini Kementerian agama belum bisa menjalankan rencana tersebut secara penuh.

“Kalau sekedar ingin mengetahui letak pemondokan tersebut mungkin sudah bisa menggunakan E-Hajj, namun kalau ingin mengetahui kondisi pemondokan dan proses kontrak melalui internet sekarang ini belum bisa dilakukan,” jelas Anggito.



Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Meski demikian, ditambahkan Ace, untuk transparansi BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) pihak Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU sudah cukup terbuka. Misalnya dalam pembahasan BPIH sebelumnya, Kemenag sudah menjelaskan rincian berapa dana yang ada dalam bentuk Sukuk dan berapa dana haji yang ada pada bank penerima setoran haji. (Ayu), foto : rizka/parle/hr.

CEPP Bangun Kesadaran Politik Kaum Muda



Mahasiswa UI dalam acara Gerakan Pendidikan Pemilih Muda Rock the Vote Indonesia: Jelajah Nusantara.

Kaum muda mesti dibangun kesadarannya untuk tidak buta politik. Kesadaran berpolitik kaum muda sangat menentukan kepemimpinan nasional masa depan. Dengan berpolitik, kaum muda dihimbau untuk ikut membangun bangsa.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka acara gerakan pendidikan pemilih muda *Rock the Vote Indonesia: Jelajah Nusantara*, di Perpustakaan Pusat UI, Depok, Minggu (25/5). Acara ini digelar oleh Center for Election and Political Party (CEPP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI.

Marzuki mengapresiasi apa yang dilakukan CEPP FISIP UI ini. Menurutnya, kaum muda memang harus dilibatkan

secara aktif dalam kegiatan politik dan berdemokrasi di negara ini. “Ini bagus sekali dan harus terus dilanjutkan. Bagaimana kita mampu menyiapkan calon-calon pemimpin kita. Bukan instan langsung jadi. Mereka harus siap berpartisipasi positif dalam pemilu dan pilpres,” katanya.

Marzuki menilai keberadaan generasi muda yang mulai memasuki usia produktif secara politik amatlah penting dalam proses pembangunan bangsa, sehingga kesadaran dan kepedulian mereka terhadap perkembangan politik harus dibina sejak dini. Ia juga menyayangkan minimnya minat generasi muda sekarang ini dalam persoalan politik berbangsa.

Fenomena kaum muda yang apatis terhadap dunia politik, mesti mendapat perhatian semua pihak terutama lembaga pendidikan. Dengan begitu, apatisisme kaum muda tidak berkembang ke arah aspirasi negatif. Dan mahasiswa harus menjadi pelopor menuju kesadaran berpolitik. Bahkan, menjadi pelopor anti politik uang di tengah pesta demokrasi. Gerakan tersebut harus dilakukan secara masif.

“Dengan jumlah yang semakin besar, partisipasi semakin besar, saya yakin dan saya harapkan Pilpres lebih baik lagi. Sebab, kita semua menyadari, politik uang menyakitkan dan merusak nilai-nilai demokrasi,” paparnya. (mh) foto: denus/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan berdialog dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro sebelum Rapat Kerja dimulai, Senin (26/5) Foto: Andry/Parle/Hr.



Anggota Komisi III Eddy Sadeli berdialog dengan pencipta lagu Anang Hermansyah sesuai RDPU Pansus RUU Hak Cipta, Rabu (28/5) Foto: Andry/Parle/Hr.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan MenPAN&RB Azwar Abubakar (kanan) menerima Laporan Pandangan Mini Fraksi tentang RUU Administrasi Pemerintahan, Selasa (20/5) Foto: Rizka/Parle/HR.



Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Utama Bulog terkait stok beras dan raskin, Senin (26/5) Foto: Andry/Parle/Hr.

